



TESIS

Judul:

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT
KETERANGAN WARIS
PRIBUMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG KEPENDUDUKAN

Disusun oleh:

HANIFAH
NIM. 217212021

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT
KETERANGAN WARIS PRIBUMI DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG KEPENDUDUKAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum
Universita Tarumanegara

Disusun Oleh:
HANIFAH
NIM. 217212021

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023**

Pengesahan

Nama : HANIFAH
NIM : 217212021
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT
KETERANGAN WARIS PRIBUMI DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG KEPENDUDUKAN
Title : The Authority Of The Notary to Make Indigenous
Inheritance Declarations Associated With The Population
Administration Law

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 21-Juli-2023.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

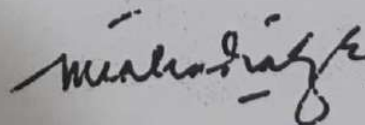
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 21-Juli-2023
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : HANIFAH
NIM : 217212021
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT
KETERANGAN WARIS PRIBUMI DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG KEPENDUDUKAN

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2023

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



ABSTRAK

- (A) Nama : Hanifah, NIM : 217212021
(B) Judul : Kewenangan Notaris Dalam Membuat Keterangan Mewaris Pribumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Kependudukan
(C) Halaman : xiv + 159 + lampiran + 2023
(D) Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Keterangan Waris, Pribumi
(E) Isi Abstrak :

Penduduk Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan agama yang menyebabkan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia. Hingga saat ini, belum ada keseragaman dalam pembuatan keterangan waris oleh tiga instansi yang berbeda, yaitu Notaris, Balai Harta Peninggalan, dan Kepala Desa/Lurah yang dikuatkan oleh Camat. Perbedaan dalam surat keterangan waris ini bermula dari penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 IS yang merupakan peninggalan politik hukum Belanda. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Kependudukan, penggolongan penduduk ini dinyatakan dihapus. Meskipun demikian, pembuatan keterangan waris masih mengacu pada penggolongan penduduk yang ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kewenangan Notaris dalam membuat keterangan waris untuk golongan pribumi berdasarkan Undang-Undang Kependudukan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini mencakup apakah Notaris berwenang membuat keterangan waris untuk golongan pribumi dan hukum waris apa yang digunakan serta bagaimana pengaturan pembuatan keterangan waris untuk pribumi sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Kependudukan, serta akibat hukum dari pembuatan keterangan waris oleh Notaris untuk golongan pribumi. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tambahan wawancara dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan untuk memberikan argumentasi hukum yang menjadi dasar penentuan kebenaran suatu peristiwa dan bagaimana peristiwa tersebut harus dilihat menurut hukum.

- (F) Daftar Acuan : 93 (1971-2023)
(G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H., Dr.
(H) Penulis : Hanifah

ABSTRACT

- (A) Name : Hanifah, NIM : 217212021
(B) Title : Notary Authority in Making Statements
Inheritance of Natives is Associated with Population Law
(C) Halaman : xiv + 159 + attachment + 2023
(D) Kata Kunci : Authorities of Notaries, Inheritance Statements, Natives
(E) Contents :

Indonesia's diverse population, consisting of different ethnicities, races, and religions, has led to the existence of pluralistic inheritance laws in the country. Currently, there is a lack of uniformity in the issuance of inheritance certificates, which involves three different authorities: Notaries, the Heritage Center, and Village Heads/Lurah, overseen by the Camat. Initially, the variations in inheritance certificates for different population groups were due to the classification of the population based on Article 131 IS, a remnant of Dutch legal politics. However, after the enactment of the Population Law, this population classification was abolished, as stated in Law Number 24 of 2013, an amendment to Law Number 23 of 2006 on Population Administration, particularly in Article 106.

This research explores the authority of Notaries in issuing inheritance statements for indigenous Indonesians, in relation to the Population Law. It investigates whether Notaries are authorized to issue inheritance statements for native Indonesians and which inheritance laws are applicable. Additionally, it examines the regulations governing the issuance of inheritance statements for natives, both before and after the implementation of the Population Law. The legal consequences of Notaries issuing inheritance statements for natives are also explored. The research employs a normative legal research method, supplemented by interviews and a statutory, historical, and conceptual approach. Secondary data from literature sources are utilized to present legal arguments that form the basis for determining the validity of events and their compliance with the law.

- (F) Reference List : 93 (1971-2023)
(G) Advisor : Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H., Dr.
(H) Writer : Hanifah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T., atas segala berkat, rahmat, kasih karunia dan nikmat kesehatan-Nya. Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Keterangan Waris Pribumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Kependudukan.

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh serta mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dalam penulisan tesis ini, penulis menandatangani arahan serta bimbingan yang sangat berarti sehingga penulis mampu menuntaskan pengerjaan tesis ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
3. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dr Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn, atas masukan perbaikan tesis ini, untuk hasil penelitian yang lebih baik;
5. Ibu Dr Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn dan seluruh dosen program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi Penulis;
6. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah membantu dalam hal Penulis menjalankan perkuliahan untuk keperluan akademik maupun administrasi;
7. Suami, anak dan seluruh sahabat, rekan sejawat, kolega, serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang

telah diberikan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Jakarta, Juli 2023

Hanifah

Pernyataan

Nama : HANIFAH
NIM : 217212021
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT
KETERANGAN WARIS PRIBUMI DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG KEPENDUDUKAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05-Juli-2023
Yang menyatakan



HANIFAH
NIM. 217212021

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoretis.....	11
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris, Pengolongan Penduduk, Surat Keterangan Waris dan Kewenangan Notaris.....	33
B. Tinjauan Teoretis.....	62
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	69
A. Hukum Waris di Indonesia dan Surat Keterangan Waris.....	69
B. Hasil Wawancara.....	108
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	114
A. Analisis Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Golongan Pribumi Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang- Undang Kependudukan.....	114

B. Analisis Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Untuk Golongan Pribumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Kependudukan Dan Hukum Waris Yang Digunakan	123
BAB V PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran.....	151
Daftar Pustaka	152

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual
2. Gambar 2. Surat Pernyataan ahli waris
3. Gambar 3. Surat Keterangan Wasiat
4. Gambar 4. Aplikasi Pengecekan Wasiat
5. Gambar 5. Piramida Hirarki Perundang-Undangan
6. Gambar 6. Akta partij (contoh akta pernyataan)
7. Gambar 7. Keterangan Hak mewaris dalam bentuk di bawah tangan

DAFTAR SINGKATAN

1. IS *Indische Staatsregeling*
2. BHP Balai Harta Peninggalan
3. BW burgerlijk wetboek (KUHPer)
4. Kadaster Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah
5. KEMENKUMHAM Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. KTP Kartu Tanda Penduduk
7. KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
8. PERMEN ATR/BPN Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
9. PERMEN A/BPN Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional
10. SERMA-RI Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
11. SKW Surat Keterangan Waris
12. UUJN Undang-Undang Jabatan Notaris
13. Undang-Undang Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
14. WNA Warga Negara Asing
15. WNI Warga Negara Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelompok ahli waris Islam

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Bimbingan Tesis
Lampiran 3	Formulir Kesiediaan Pembimbingan Tesis
Lampiran 4	Berita Acara Bimbingan Tesis
Lampiran 5	Berita Acara Bimbingan dari Lintar
Lampiran 6	Tanda pengesahan Tesis Untuk diuji
Lampiran 7	LOA Jurnal
Lampiran 8	Tangkapan Layar jurnal telah terbit
Lampiran 9	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 10	Hasil Turnitin
Lampiran 11	Permohonan Kunjungan Notaris-PPAT Kabupaten Tangerang
Lampiran 12	Permohonan Kunjungan Notaris-PPAT Kota Tangerang
Lampiran 13	Surat Keterangan Wawancara Notaris-PPAT Kabupaten Tangerang
Lampiran 14	Surat Keterangan Wawancara Notaris-PPAT Kota Tangerang
Lampiran 15	SERMA-RI Nomor MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 (SERMA-RI) tanggal 8 Mei 1991
Lampiran 16	Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah tertanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 (Kadaster)
Lampiran 17	Contoh Surat Keterangan wasiat dari kemenkumham
Lampiran 18	Contoh Surat Keterangan waris dari kelurahan
Lampiran 19	Contoh Surat Keterangan waris dibawah tangan yang dibuat Notaris